



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

**JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 1 –
MEDAN Satria KOTA BEKASI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABEL.....ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

 Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD.....2

1.2 Dasar Hukum3

1.3 Maksud dan Tujuan6

1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERJALAN8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP23

BAB IV PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II..... 8

TABEL 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) . 10

TABEL 2.3 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024..... 18

TABEL 2.4 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 21

TABEL 3.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025..... 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan (Rencana Kerja Perubahan) adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang disusun ketika ada kondisi atau faktor tertentu yang menyebabkan perubahan terhadap Renja awal (Rencana Kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan.

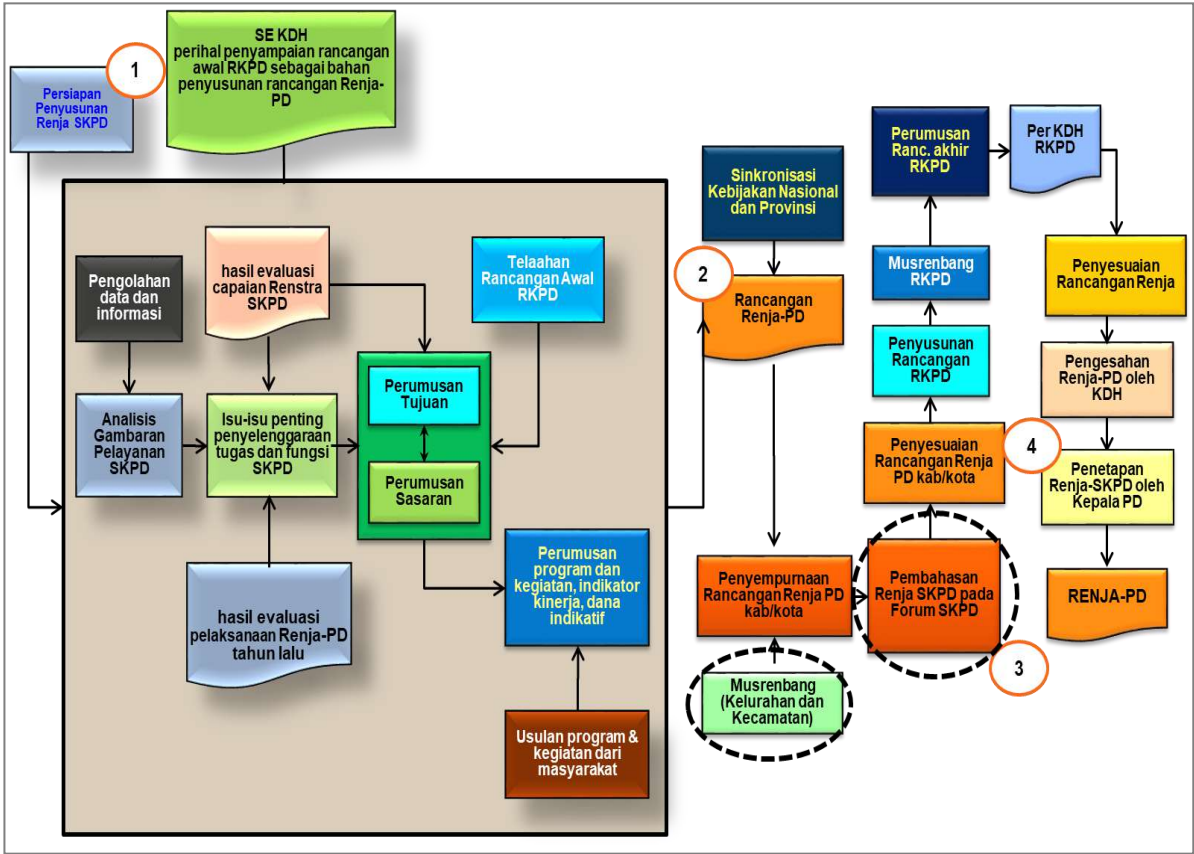
Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Satpol PP Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 dengan mempedomani Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan mengacu RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 di samping mengacu kepada RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 juga menelaah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Dalam tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 serta mengacu pada perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025. Perubahan ini juga menindaklanjuti telah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode tahun 2025-2030.

Perubahan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Nomor 1312);
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
- 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- 24.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
- 25.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
- 26.Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
- 27.Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
- 28.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 29.Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor).
- 30.Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

1.3 **Maksud dan Tujuan**

- A. Maksud
 - 1. Menyesuaikan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan perkembangan kondisi aktual (misalnya adanya kebijakan nasional/daerah baru, perubahan anggaran, atau keadaan darurat);
 - 2. Menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sisa tahun berjalan;
 - 3. Menjamin agar program dan kegiatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah meskipun ada perubahan.
- B. Tujuan
 - 1) Mengakomodasi perubahan kebijakan, prioritas, atau pendanaan dalam APBD Perubahan;
 - 2) Menyesuaikan target kinerja dengan perkiraan realisasi dan kebutuhan riil di lapangan;
 - 3) Memberikan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 - 4) Menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SatpolPP
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SatpolPP

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Maksud dan Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan serta Sistematika Penulisan.
- 2. Bab 2 (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- 3. Bab 3 (tiga) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Serta Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.
- 4. Bab 4 (empat) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauh mana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

Pada tahun 2025, Satpol PP Kota Bekasi memiliki 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
- 2. Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Satpol PP Kota Bekasi tahun 2025 melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.715.995.731	30.494.600.353	43,70
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.435.729.480	9.406.193.950	22,98
JUMLAH	99.151.725.211	39.900.794.303	36,35

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan tabel diatas, Satpol PP Kota Bekasi menganggarkan sebesar Rp. **99.151.725.211** dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. **39.900.794.303** atau sebesar **36,35 %**. Adapun selanjutnya hasil evaluasi kinerja tahun 2025 jika dikaitkan dengan target pencapaian Renstra Satpol PP tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2025, sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TABEL 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
(tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024 Orang/bulan	3132 Orang/Bulan 2784 Orang/Bulan	3024 Orang/bulan	3024 Orang/bulan	100%	11096 Orang/bulan	11096 Orang/bulan	100%
2,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	4 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%
3,1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	14 Unit	14 Unit	100%	-	-	-
3,2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100%
3,3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	-	-	-	-	15 Orang	15 Orang	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%
4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1307 Unit	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4,2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	100%
4,3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9760 unit	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4,4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	292 Unit 161003 Lembar	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	200 Buku/exemplar	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4,6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87 Kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4,8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	-	-	-	-	13 Unit	13 Unit	100%
5,2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	6 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
6,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84 Rek/Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120 Orang/Bulan 6216 Orang/Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	54 Unit	57 Unit	57 Unit	100%	58 Unit	58 Unit	100%
7,3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	130 Unit	130 Unit	100%
7,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkara Rasio Linmas di Tiap Kelurahan	100 1 : 31 % Anggota/Kelurahan		100 1 : 31 % Anggota/Kelurahan	100 1 : 31 % Anggota/Kelurahan	100%	100 1 : 31 % Anggota/Kelurahan	100 1 : 31 % Anggota/Kelurahan	100%
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1,1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	14 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1,2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1,3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Orang	606 Orang	581 Orang	581 Orang	100%	60 Orang	60 Orang	100%
1,4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1,5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	116 laporan	15 Kali 23 Hari 42 Keg	250 laporan	250 laporan	100%	116 laporan	116 laporan	100%
1,6	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	36 Kali 145 Kali	254 Laporan	254 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1,7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1,8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	42 Unit	895 Unit	895 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2,1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2,2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2,3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator Program sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, dari 9 (sembilan) Indikator Program seluruhnya dapat mencapai target.

Adapun faktor keberhasilannya adalah :

1. Adanya Komitmen tim penyusunan dokumen perencanaan dan tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detail/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya; serta
3. dilaksanakannya monitoring secara berkala terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Analisis kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan Fungsi dan tugas Satpol PP Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Satpol PP Kota Bekasi.

Pada tahun 2024, Satpol PP Kota Bekasi memiliki 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu : (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat, dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi indikator kinerja utama (IKU).

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TABEL 2.3
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31	1 : 31
		Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	100%	89,42%	Tercapai
		Nilai AKIP	Nilai	B	B	Tercapai
		SPM	%	60%	56,90%	Tercapai

Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dalam perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi telah dianalisis capaian kinerja baik itu IKU maupun IKK. Dari hasil capaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1. Masih tingginya kasus penyelenggaraan perda oleh masyarakat
- 2. Masih kurang dan belum optimalnya personil linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- 3. Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
- 4. Belum optimalnya manajemen kinerja organisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Isu penting yang dihadapi Satpol PP Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

- 1. Untuk itu akan diadakan sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada di Satpol PP Kota Bekasi
- 2. Akan diadakan pengawasan dalam penegakan perda
- 3. Penguatan terhadap kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan tingkat kota.
- 4. Melakukan pembinaan terhadap personil linmas
- 5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi dan belum terbangunnya pola budaya kinerja pada setiap level organisasi.

Arah pembangunan Kota Bekasi tahun 2025 menekankan pada pencapaian target atas sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan dalam Visi dan Misi Wali Wali Kota Terpilih sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berharap menjadi Dinas yang diperhitungkan dengan permasalahan yang sangat mendasar di dalam menciptakan, memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan alasan yang kuat antara lain :

- 1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
- 2. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
- 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 4. Masih tingginya unjuk rasa di Kota Bekasi
- 5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
- 6. Semakin menjamurnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, di wilayah Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang serius terutama penanganan pasca dilakukan penertiban atau operasi.
- 7. Permasalahan di daerah perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.
- 8. Daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial karena heterogenitas masyarakat Kota Bekasi yang mayoritas bukan penduduk tetap;
- 9. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
- 10. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
- 11. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TABEL 2.4 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	Ketersediaan sarana dan prasarana Satpol PP belum sepenuhnya memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Satpol PP. Beberapa fasilitas seperti kendaraan patroli. Keterbatasan ini berdampak pada cakupan wilayah patroli, kecepatan respon terhadap aduan masyarakat, serta efektivitas operasi lapangan.
2		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan penegakan Perda dan Perkada, mulai dari penerimaan aduan, verifikasi lapangan, pelaksanaan operasi, hingga pelaporan hasil. Namun, sebagian SOP masih bersifat umum dan belum diperbarui sesuai ketentuan terbaru perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS Satpol PP yang telah lulus Diklat Dasar dan anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM masih belum mencapai standar minimal SPM. Sebagian besar personel lapangan telah mendapatkan pelatihan teknis dasar, namun belum seluruhnya mengikuti diklat yang bersertifikat nasional.
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) sering berdampak pada kerugian material, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. Standar pelayanan dalam menangani dampak tersebut telah tersedia

Analisis kinerja pelayanan SPM Satpol PP menunjukkan tren positif dengan capaian indikator yang sejalan dengan target Renstra. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan patroli rutin, kerja sama lintas OPD, dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsive.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Pada tahun 2025 Satpol PP Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan 33 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Berikut program yang dilaksanakan tahun 2025 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur Satpol PP Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan Satpol PP yang berkualitas, serta untuk mewujudkan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas Satpol PP Kota Bekasi yang akuntabel.

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- 3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- 4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- 5. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Satpol PP guna melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki rencana kerja tahun 2025 hasil desk penajaman dengan total pagu sebesar **Rp. 99.151.725.211,-** dengan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir)

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
					Satuan Polisi Pamong Praja					120.125.906.140	99.151.725.211			115.050.137.483		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					120.125.906.140	99.151.725.211			115.050.137.483		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					120.125.906.140	99.151.725.211			115.050.137.483		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100 %	100 %	82.713.450.660	75.715.995.731		100 %	79.063.611.770		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100 %	100 %	160.000.000	160.000.000		100 %	20.000.000		
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	92.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.000.000		
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	10 Laporan	10 Laporan	10.000.000	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	10.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100 %	100 %	46.799.112.000	46.799.112.000		100 %	62.079.979.000
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	224 Orang/bulan	11096 Orang/bulan	46.789.112.000	51.737.542.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12 Orang/bulan	62.069.979.000
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	10.000.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		100 %	100 %	2.920.224.000	2.920.224.000		100 %	1.000.000.000
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	1 Paket	4 Paket	2.620.224.000	2.620.224.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	1.000.000.000
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi, Medansatria, Semua Kel/Desa	58 Orang	15 Orang	300.000.000	256.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100 %	100 %	1.538.886.800	1.538.886.800		100 %	1.460.342.770
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	1 Paket	1 Paket	44.348.030	44.348.030	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	50.000.000
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	5 Paket	5 Paket	325.723.000	325.723.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	325.723.000
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	4 Paket	4 Paket	565.656.000	565.656.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	565.656.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	3 Paket	3 Paket	132.963.770	132.963.770	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Paket	132.963.770
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	30.000.000

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	100.000.000
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	340.196.000	256.096.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	256.000.000
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	-	5 Dokumen	-	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100 %	100 %	1.176.305.000	1.176.305.000		100 %	4.923.290.000
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	-	13 Unit	-	1.519.840.281	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	4.822.000.000
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	45 Unit	14 Unit	1.176.305.000	101.290.000	Pendapatan Bagi Hasil	1 Unit	101.290.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100 %	100 %	26.438.918.560	26.438.918.560		100 %	1.400.000.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	1.240.200.000	1.240.200.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1.400.000.000
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	25.198.718.560	13.207.652.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100 %	100 %	3.680.004.300	3.680.004.300		100 %	8.180.000.000
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	6 Unit	6 Unit	281.004.300	281.004.300	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6 Unit	281.000.000
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	58 Unit	58 Unit	1.700.000.000	1.700.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75 Unit	1.700.000.000
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	30 Unit	130 Unit	699.000.000	699.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Unit	699.000.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	485.316.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	5.500.000.000

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan		-	100 1 : 31 % Rasio	37.412.455.480	23.435.729.480		100 % 1: 31 Rasio	35.986.525.713
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		-	100 %	36.683.100.480	36.683.100.480		100 %	35.718.525.713
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000	70.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	238.000.000
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	21.082.706.000	20.139.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	26.791.926.000
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	60 Orang	490.000.000	534.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	1.833.831.300	599.131.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Dokumen	593.250.000
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional									
						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja							40 Orang	366.000.000

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan											
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116 laporan	116 laporan	2.325.252.000	673.952.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 laporan	673.000.000		
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	5.625.218.080	928.318.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	2.790.000.000		
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah											

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	103.593.100	76.593.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	103.593.100
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	15 Unit	22 Unit	4.772.500.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	4.162.756.613
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		-	100 %	729.355.000	729.355.000		100 %	268.000.000
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	1 Laporan	1 Laporan	147.370.000	147.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	311.700.000	153.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	193.000.000
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	270.285.000	111.885.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	75.000.000
J U M L A H										120.125.906.140	99.151.725.211			115.050.137.483

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan perubahan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Sehubungan dengan evaluasi dan penyesuaian anggaran tahun berjalan, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan alokasi anggaran dari sebelumnya Rp 120.125.906.140 menjadi Rp 99.151.725.211 Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional terkini. Perubahan anggaran ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pengawasan dalam menjaga ketertiban umum di wilayah kerja.

Adapun kaidah pelaksanaan Renja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Renja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- 2. Seluruh komponen bidang, sub bidang dan sub bagian pada Satpol PP Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi tahun 2025 dengan Sebaik-baik nya;
- 3. Program-program yang tercantum dalam Renja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan anggaran;
- 4. Agar Renja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Satpol PP Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran *Stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Awal Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas upaya penyeragaman dan penyamaan persepsi melalui komunikasi, koordinasi dan konsolidasi internal mutlak diperlukan sehingga pencapaian target kinerja bukan hanya tanggung jawab Kepala SKPD selaku pimpinan satpol PP melainkan seluruh jajaran pemangku jabatan di setiap bidang beserta staf yang ada dibawahnya.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis serta sejalan dengan tugas dan fungsi. Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renja Perubahan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Satpol PP yang melaksanakan program dan kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Satpol PP Kota Bekasi tahun berikutnya.

Segala kekurangan diharapkan selalu menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk selanjutnya bisa mencapai hasil yang maksimal.

Bekasi, 3 Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BEKASI



KARTO, S.I.P. M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670415 198603 1 005